

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi dan untuk mengetahui serta mengkaji upaya dalam meminimalisir disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi disebabkan oleh kebebasan hakim dalam menentukan pidana dikaitkan dengan rentang batas pidana maksimum dan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 29 UU Pornografi, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Selain itu, kurangnya pemahaman hakim dalam memperhatikan kepentingan terbaik bagi perempuan sebagai korban tindak pidana serta pemulihan korban juga mempengaruhi hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Penting bagi hakim dalam memahami makna PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya guna kepentingan terbaik korban, serta perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai pedoman pemidanaan yang termuat dalam jenis regulasi Peraturan Mahkamah Agung, hal ini karena materi rumusan pedoman pemidanaan berupa peraturan, maka bentuk produk hukum yang sesuai juga berupa peraturan. Pedoman pemidanaan dalam bentuk PERMA memberikan keyakinan hakim bahwa pidana yang dijatuhkannya telah proporsional antara perbuatan pelaku, karakter pelaku tindak pidana, dan akibat dari tindak pidana tersebut serta membantu hakim dalam memahami tujuan yang hendak dicapai dari putusan yang dijatuhkannya, sehingga disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi dapat diminimalisir sehingga dapat tercipta keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, serta keadilan moral.

Kata Kunci: Disparitas pidana, Tindak pidana pornografi, Pertimbangan Hakim,
Pedoman pemidanaan

ABSTRACT

This study aims to identify and examine the occurrence of criminal disparities in pornographic criminal cases and to identify and examine efforts to minimize criminal disparities in pornographic criminal cases. The research method used is normative juridical with the approaches used are the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The results of this study indicate that the occurrence of criminal disparities in pornography crime cases is caused by the freedom of judges in determining the crime associated with the range of maximum and minimum criminal limits contained in Article 29 of the Pornography Law, and associated with the facts revealed in court. In addition, the lack of understanding of judges in paying attention to the best interests of women as victims of criminal acts and the recovery of victims also affects judges in giving legal considerations. It is important for judges to understand the meaning of PERMA Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Prosecuting Women Against the Law in providing legal considerations for the best interests of the victim, and the need for clear arrangements regarding sentencing guidelines contained in the types of regulations of the Supreme Court Regulations, this is because the formulation material punishment guidelines are in the form of regulations, then the appropriate form of legal product is also in the form of regulations. The sentencing guidelines in the form of PERMA provide judges with confidence that the punishments imposed have been proportionate between the actions of the perpetrators, the character of the perpetrators of the crime, and the consequences of the crime as well as assisting judges in understanding the objectives to be achieved from the decisions they pass, so that criminal disparities in pornographic crime cases can be minimized so that justice can be created, certainty, legal benefit, and moral justice.

Keywords: Criminal disparity, Pornography crime, Judge's consideration, Sentencing guidelines